

## ABSTRAK

Nama : Sholid Jamario

Dosen pembimbing utama : Sutrisni, SH,MH

Dosen pembimbing pendamping : Dr. Dian Novita, SH,MH

Proses pemberhentian perangkat Desa oleh kepala desa dikarenakan adanya perlawanan politik, atas kepentingan sendiri yang dilakukan oleh Kepala Desa, perangkat Desa mempunyai tugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang dari kepala desa, maka atas dasar asas peraturan tersebut proses pengangkatan perangkat desa perlu di buat syarat-syarat pengangkatan perangkat desa, lama masa jabatan, alur keuangan, fungsi pokok dari tugas, hal-hal yang tidak boleh di langgar selama menjabat dan tata cara pemberhentian.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta menggunakan beberapa sumber bahan hukum primer, sekunder, teknik penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa harus tetap mengacu pada prosedur dan ketentuan yang ada, bahkan di Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sudah ada dalam Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkan penjelasan diatas maka apabila terjadi sengketa berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dapat diselesaikan melalui Upaya *non litigasi* atau upaya diluar pengadilan dan Upaya *litigasi* atau melalui jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan

Dapat ditarik kesimpulan dan saran dari hasil penulisan skripsi ini adalah Dalam mengurus rumah tangganya sendiri Pemerintahan Desa dikepalai yakni oleh seorang Kepala Desa yang pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang dalam tata cara dan prosesnya memiliki suatu prosedur berupa pertanggung jawaban dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

Kata Kunci : Pemberhentian, Register Desa, Kepala Desa

## **ABSTRACT**

Name : Sholid Jamaro

Principal Advisers : Sutrisni, S.H.M.H

Companion Guide : Dr. Dian Novita, S.H.M.H

The process of termination the village staff by the village chief due to political opposition, on his own behalf by the village chief, leaving the village has the duty to assist the village chief in carrying out the duties and authority of the village, so on the basic of the consistent principle that the establishment as a condition for the establishment of the village set, old tenure, financial flow, basic function of duty, things you shouldn't break during the shake and the ordinance of termination

In laying of the village devices the research methods in writing the script employ nomadic research methods, using regulatory and case approaches, and using several primary, secondary, law tracing techniques trought law and other literaturature

The remoal and termination of village devices by the village head should remain in reference to existing procedures and provisions, even in sumenep implementation and village device stops already in area ordinance. According to the foregoing in case of interference with the village chief in a dismissal of the device the village could be settled through non litigation or litigation efforts and litigation or legal interference by litigation.

To be drawn to conclusions and suggestions from writing this essay is to manage his own household the village government is headed by a village chief who is basically responsible for village people who in the ordinance and process have a procedure of accepting responsibility in the adoption and termination of the village device.

Keyword : Stoping, Village Register, Village Chief